DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna.

Azis, H.A. 2017. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta.

Ghofur, A., and P. S. Sukmaningrum. 2018. "Pegaruh Good Corporate Governance Terhadap Efisiensi Bank Syariah Tahun 2012-2016 Dengan Kinerja Sosial Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 4 (1): 30.

Hasma. 2016. "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Upaya Peningkatannya Di Kabupaten Enrekang." *Skripsi*. Muhammadiyah Makassar.

Herawati, T., and D Nopianti. 2017. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *STAR – Study & Accounting Research* XIV (2): 45. www.stiestembi.ac.id.

Heriani, B. 2016. "Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Daerah Kota Makassar." *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Lesmana, I., R. D. CH. Pamikiran, and I. L. Labaro. 2017. "Produksi Dan Produktivitas Hasil Tangkapan Kapal Tuna Hand Line Yang Berpangkalan Di Kelurahan Mawali, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung (Production and Productivity of the Tuna Hand Line Fishing Boat at Mawali Village, North Lembeh District, Bitung Cit." *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap* 2 (6): 205–11.

Maryam, N. S. 2022. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Media Administrasi* 7 (1): 78–90.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020." *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Nasir, M. S. 2019. "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2 (1): 30.

Nusa, Y., and L. Panggalo. 2022. "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021." *Journal of Financial and Tax* 2 (2): 145–58.

Parapat, N., F. Yuliani, and M. Y. T. Tinov. 2017. "Penerapan Good Governance Dalam Penetapan Apbd." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 14 (3): 310–16.

Pertiwi, S. H. Darma. 2017. "Analisis Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Desa Nepo Kecamatan Tanasitodo Kabupaten

Wajo." *Tugas Akhir Universitas Hasanuddin Makasar*.

Prasanti, D. 2018. "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan." *Lontar Jurnal Ilmu Komunikasi* 6 (1): 13–21.

Pratiwi, J. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Bakorwil 1 Madiun." *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Presiden Republik Indonesia. 1945. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Ketatanegaraan*. Jakarta.

———. 1999a. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999." *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

———. 1999b. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999." *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta.

———. 1999c. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999." *Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*. Jakarta.

———. 2000a. "Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor Tahun 110 Tahun 2000." *Kedudukan Keuangan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta.

———. 2000b. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000." *Dana Perimbangan*. Jakarta.

———. 2000c. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000." *Pengolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangn Daerah*. Jakarta.

———. 2000d. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000." *Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan*. Jakarta.

———. 2000e. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000." *Pinjaman Daerah*. Jakarta.

———. 2000f. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000." *Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah*. Jakarta.

———. 2000g. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000." *Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*. Jakarta.

———. 2003. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003." *Keuangan Negara*. Jakarta.

———. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004." *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

———. 2009. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.” *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

———. 2010. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.” *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.

———. 2014. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.” *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

———. 2019. “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.” *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

———. 2020. “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020.” *Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Jakarta.

Pribadi, A. 2017. “Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Balanced Scorecard Pada Pure Non Profit Organization Di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.” *Skripsi. Program Studi Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang*. universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang.

Rijali, A. 2019. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (33): 81.

Rusdi. 2018. “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.” *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Simanjuntak, K. M. 2015. “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia.” *Jurnal Bina Praja* 07 (02): 111–30.

Suci, T. S. M., H. Karamoy, and S. Rondonuwu. 2019. “Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado.” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14 (4): 362–70.

Wahyuni, A. S. 2020. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta.” *Jurnal STEI* XX (Xx): 1–22.

Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur. 2021a. “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021.” *Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya*. Surabaya.

———. 2021b. “Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021.” *Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Surabaya*. Surabaya.